

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat di seluruh dunia dikejutkan dengan sebuah kejadian yang merupakan kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui dan berasal dari Kota Wuhan, China. Para ahli menyebutkan bahwa virus ini bisa menular kepada manusia dan juga hewan, dengan cara menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan sindrom pernapasan akut berat (SARS) yang ditandai dengan gejala awal flu. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan pernapasan ketika batuk ataupun bersin (Mukharom & Aravik, 2020). WHO mengumumkan bahwa penyebaran virus telah menjadi wabah dan diumumkan sebagai *Pandemic Global*. Penyebaran virus ini terjadi dalam waktu yang singkat dan telah menyebar ke berbagai Negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 telah memasuki berbagai sektor serta lini kehidupan termasuk perekonomian dan bisnis (Dunakhir & Idrus, 2021). *Economic shock* yang diakibatkan oleh Covid-19, telah mempengaruhi ekonomi dari perorangan, rumah tangga, perusahaan skala UMKM maupun perusahaan besar, hal tersebut berdampak mulai dari skala lokal, nasional, hingga internasional (Taufik & Ayuningtyas, 2020). Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan secara signifikan. Pada data *International Monetary Fund* (IMF) yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat pada data kuartal IV Tahun 2020 adalah -2,4%, Jepang -1,2%, Korea Selatan adalah -1,4%, dan Singapura yang menurun hingga -3,8%.

Hal tersebut juga telah terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2020 kuartal I adalah 2,97%, kemudian menurun di kuartal II sebesar -5,32%, selanjutnya pada kuartal III menurun hingga -3,49% dan kuartal IV menurun ke -2,19%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dalam 2 (dua) kuartal berturut-turut secara negatif, mengakibatkan Indonesia memasuki periode resesi ekonomi.

Beberapa literasi menyebutkan bahwa resesi ekonomi diartikan sebagai fenomena ketika PDB riil minus selama 2 (dua) kuartal beruntun, sehingga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan lain-lain, mengalami penurunan yang mengakibatkan efek domino hingga merugikan berbagai pihak, salah satunya karyawan yang harus menerima pemutusan hubungan kerja (PHK). Terjadinya pelemahan ekonomi global juga akan mempengaruhi perekonomian domestik negara-negara di seluruh dunia, hal tersebut menjadi tanda telah terjadinya resesi. Ketergantungan perekonomian suatu negara pada perekonomian global akan semakin menguatkan peristiwa resesi ekonomi menimpa ekonomi domestik (Miraza, 2019). Resesi ekonomi juga menimbulkan efek seperti menurunnya laba perusahaan, berkurangnya lapangan kerja serta minat investasi secara bersamaan. Pada saat resesi ekonomi, akan selalu berkaitan dengan menurunnya harga yang disebut deflasi, atau kenaikan harga yang signifikan (inflasi) dalam proses yang disebut stagflasi. Faktor lain terjadinya resesi bisa terlihat dari beberapa hal seperti ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, pertumbuhan ekonomi yang

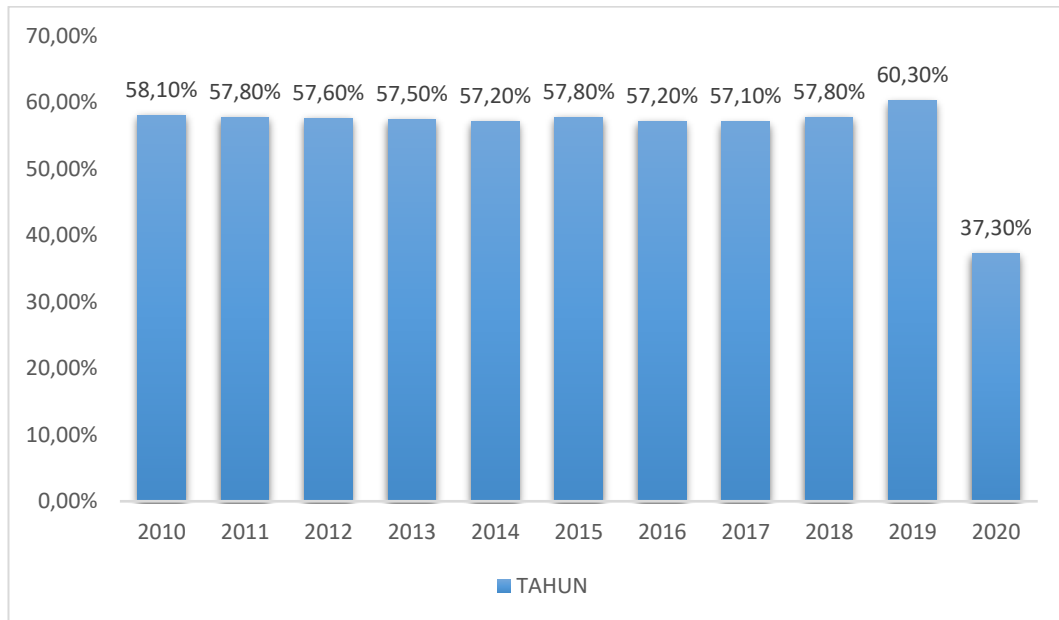
semakin melambat atau menurun selama dua kuartal berturut-turut, nilai ekspor yang menurun dan meningkatnya nilai impor, serta meningkatnya pengangguran.

Pada masa resesi ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memerlukan perhatian khusus karena peran besarnya dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan UMKM yang memainkan peran vital dan strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, tujuan utama pengembangan sektor ini adalah untuk menciptakan dan memperluas usaha demi mendukung pembangunan ekonomi nasional yang adil dan demokratis. UMKM di Indonesia berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan PDB, serta menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan ekonomi yang produktif.

Di negara berkembang, UMKM memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Prasetyo, 2020). Sektor ini dinilai sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi karena kemampuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan (Zeb & Ihsan, 2020). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat dari Rp 5.721,1 triliun pada 2018 menjadi Rp 7.034,1 triliun pada 2019, atau tumbuh sebesar 22,9%. Selain itu, UMKM juga menyerap sekitar 96,92% tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 15,65% terhadap ekspor nonmigas.

Grafik 1.1 : Kontribusi UMKM Terhadap PDB Nasional



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Hambatan bagi UMKM dinilai karena adanya krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk Indonesia. Survei kajian cepat pada Mei 2020, yang dilakukan LIPI menunjukkan bahwa sebanyak 94,69% pelaku usaha telah terdampak Covid-19 dan mengalami penurunan Penjualan. Beberapa pelaku usaha bahkan mengalami penurunan penjualan lebih dari 75% dan terancam harus menutup usahanya. Selain itu, sebanyak 47,13% usaha diperkirakan hanya mampu bertahan satu hingga tiga bulan ke depan. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan dimuat dalam (CNN, 2021), Ketua umum asosiasi UMKM Indonesia menyampaikan bahwa terdapat paling tidak 30 juta UMKM di Indonesia yang telah bangkrut di tahun 2020 disebabkan adanya gelombang covid-19. Data dari grafik di atas juga menunjukkan Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

ke Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 merupakan yang terendah sejak 2010 yakni 37,3 persen. Kontribusi tersebut mengalami penurunan hingga 38,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dikutip dari CNBC (2021), Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) yaitu Ikhsan Ingratubun pada saat pelatihan BI mengatakan, selama tahun 2020 ada sekitar 30 juta UMKM yang bangkrut karena Covid-19 dan pada tahun 2019 jumlah UMKM di Indonesia ada sebanyak 64,7 juta, kemudian setelah terjadi pandemi Covid-19 jumlah UMKM di Indonesia menjadi 34 juta di tahun 2020.

Penurunan signifikan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan UMKM menjadi isu penting bagi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk mengantisipasi ancaman resesi ekonomi berikutnya (Rinaldi dkk., 2022). Penting bagi manajemen dan pemilik badan usaha untuk memprediksi keberlangsungan usaha guna mengantisipasi adanya potensi kebangkrutan, karena kebangkrutan menyangkut terjadinya biaya-biaya baik biaya langsung maupun tidak langsung. Keberlangsungan usaha merupakan sebuah kondisi ketika perusahaan mampu menjalankan dan mengembangkan usaha karena memiliki kecukupan dana (Miradji dkk, 2020). Cara pandang pemilik atau manajer terhadap risiko, tanggung jawab, kerja keras, pengalaman usaha, kepercayaan diri, dan sikap inovatif menjadi salah satu faktor keberlangsungan usaha (Andriyani & Mulyanto, 2022). Dukungan bisnis, faktor individu, ketersediaan modal, dan faktor manajemen juga menjadi faktor penentu kesuksesan bisnis pada UMKM (Al-Tit dkk, 2019). Menurut Steven & Bahar (2022) keberlanjutan usaha atau *sustainable business* merupakan suatu proses tindakan berkelanjutan atau suatu bentuk konsistensi dari kondisi suatu

usaha, dimana keberlanjutan ini merupakan pemeliharaan proses, tindakan dan usaha baik yang mencakup pertumbuhan, perkembangan, strategi untuk menjaga kelangsungan usaha agar dapat terus beroperasi dan berkembang dalam jangka panjang.

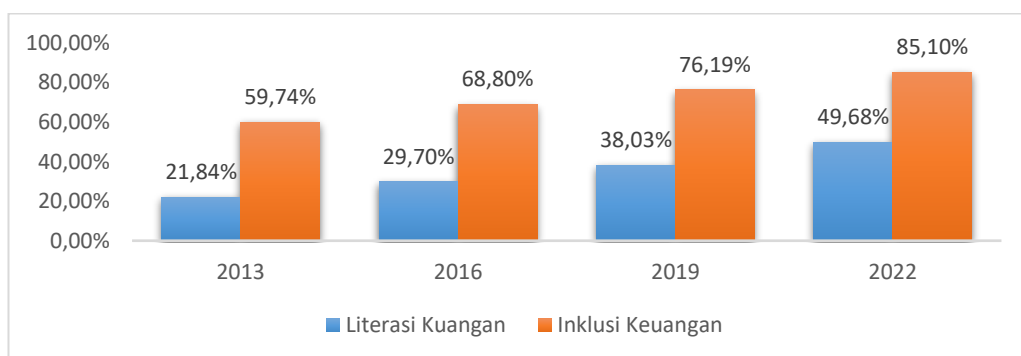
Bisa disimpulkan, selain membutuhkan tanggung jawab dan kerja keras, pelaku usaha juga harus memiliki dukungan lainnya seperti ketersediaan modal dan kemampuan dalam manajemen usahanya guna mendukung keberlangsungan usahanya seperti pemahaman mengenai dasar keuangan.

Penelitian dari Sugiharo dkk (2023) menggunakan indikator seperti profitabilitas, jejak ekologi, dan tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Steven & Bahar (2022) menggunakan 4 indikator untuk mengukur keberlanjutan bisnis yaitu peningkatan kinerja usaha, peningkatan sumber daya, dan pengembangan manajemen keuangan. Amelia, Nauli, dan Desriani (2020), yang merumuskan beberapa indikator utama untuk menilai sejauh mana usaha dapat dikatakan berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut meliputi pemenuhan *Break Even Point* (BEP), yaitu titik impas di mana total pendapatan setara dengan total biaya, sebagai tolok ukur keberhasilan keuangan; tingkat kepuasan konsumen, yang mencerminkan penerimaan pasar terhadap produk atau layanan yang ditawarkan; kepuasan karyawan, sebagai indikator keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya manusia; efektivitas strategi pemasaran, yang menunjukkan kemampuan usaha dalam menjangkau dan mempertahankan pasar; ketersediaan layanan dan persediaan, yang merefleksikan kesiapan operasional dan efisiensi rantai pasok dalam mendukung kelangsungan usaha.

Pemahaman yang baik mengenai literasi dan inklusi keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan dalam mengelola keuangan usaha, yang memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan dan kelangsungan usaha tersebut. Oleh karena itu, edukasi mengenai literasi keuangan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diberikan kepada pelaku UMKM.

Diperlukan adanya peningkatan kinerja serta keberlanjutan usaha guna mendukung kontribusi UMKM dalam upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Sanistasya dkk. (2019), diketahui bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja UMKM. Selain itu, inklusi keuangan juga terbukti dapat mendukung keberlangsungan usaha UMKM dalam jangka panjang.

Grafik 1.2 : Tingkat Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Nasional



Sumber : Otorisasi Jasa Keuangan (2023)

Indeks literasi dan inklusi keuangan nasional menunjukkan tren peningkatan yang positif. Literasi keuangan nasional yang awalnya sebesar 21,94% pada 2013 meningkat menjadi 29,70% pada 2016, dan terus bertumbuh hingga mencapai 38,30% pada 2019. Hal serupa juga terjadi pada inklusi keuangan, yang

naik dari 59,74% pada 2013 menjadi 67,80% di tahun 2016, dan mencapai 76% pada 2019. Peningkatan ini menjadi sinyal baik, khususnya bagi pelaku UMKM, karena semakin banyak yang memiliki akses dan pemahaman terhadap layanan keuangan.

Kurangnya pemahaman dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan menjadi tantangan serius bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan sangat penting guna memperkuat keberlanjutan usaha dan menghadapi dinamika ekonomi. Rinaldi dkk. (2022) menyatakan bahwa kemampuan pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan UMKM bertahan di tengah fluktuasi ekonomi. Penelitian oleh Idawati & Pratama (2020) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara literasi keuangan dengan kinerja dan keberlangsungan UMKM di Kota Denpasar. Namun, temuan berbeda diperoleh dari studi oleh Naufal dan Purwanto (2022) yang meneliti sektor UMKM F&B di Kecamatan Sumbersari, Jember, yang menyimpulkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha. Begitu pula Kusuma dkk. (2022) yang menemukan bahwa literasi keuangan tidak memiliki dampak terhadap keberlanjutan UMKM di wilayah Solo Raya.

Terlepas dari perbedaan hasil penelitian, inklusi keuangan tetap menjadi faktor kunci dalam penguatan sektor UMKM. Akses terhadap layanan keuangan formal memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal dan memperluas jangkauan bisnis. Sayangnya, menurut data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tahun 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal, baik

bank maupun non-bank. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya intensif untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan.

Inklusi keuangan sendiri merujuk pada ketersediaan layanan keuangan yang mudah diakses, terjangkau, dan digunakan secara efektif oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelkar (2019) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai pemberian layanan keuangan—termasuk simpanan, kredit, asuransi, dan pembayaran—kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan terpinggirkan dengan biaya yang terjangkau melalui lembaga keuangan formal.

Menurut Muniroh (2019), inklusi keuangan berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang merata dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks UMKM, akses terhadap layanan keuangan formal tidak hanya memperkuat keberlanjutan usaha, tetapi juga membantu mengurangi angka kemiskinan. Inklusi keuangan juga melindungi pelaku UMKM dari risiko keuangan seperti penipuan atau kerugian investasi.

Dari perspektif makro ekonomi, inklusi keuangan memiliki kontribusi besar dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 75% pada tahun 2019. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketimpangan sosial, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Melihat fenomena yang terjadi pada masa resesi ekonomi tahun 2020 dan penelitian terdahulu terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan pada UMKM, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan studi kasus di Wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Pada tahun 2021 setelah masa resesi ekonomi melanda Indonesia, UMKM di Kecamatan Tenggilis Mejoyo mendapatkan perhatian yang paling tinggi bersama Kecamatan Wonocolo. Dikutip dari [jatim.antaranews \(2021\)](#), Wakil Walikota Surabaya yaitu Armuji telah memberikan dukungan dana sebesar Rp 56.000.000 untuk 112 pelaku UMKM di Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan berharap UMKM bisa menjadi tonggak pemulihan ekonomi di Surabaya.

Dukungan pemerintah ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga strategis bagi keberlangsungan usaha UMKM. Menurut teori keberlangsungan usaha, sebuah entitas bisnis dapat dikatakan berkelanjutan apabila mampu mempertahankan operasionalnya dalam jangka panjang meskipun menghadapi tekanan lingkungan, termasuk krisis ekonomi (Kurnia & Hapsari, 2025). Dalam konteks tersebut, bantuan modal kerja berfungsi sebagai penguatan likuiditas sekaligus peluang bagi UMKM untuk beradaptasi dan menjaga daya saing.

Lebih jauh, resesi ekonomi telah menekan daya beli masyarakat dan mengurangi arus kas pelaku usaha. Oleh karena itu, intervensi seperti pendanaan, literasi keuangan, serta akses pada inklusi keuangan menjadi faktor penting untuk memastikan UMKM tetap bertahan. Dengan adanya dukungan dana yang diberikan pemerintah Kota Surabaya, UMKM di Kecamatan Tenggilis Mejoyo diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi menjadi sektor yang resilien

terhadap krisis, sehingga mampu menopang pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Namun, berdasarkan data 2025 yang diperoleh dari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, diketahui bahwa hanya sebanyak 75 pelaku UMKM yang mampu menyajikan informasi keuangan secara rinci, meliputi data omset, laba, serta pengeluaran operasional usaha. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pencatatan keuangan dasar sebagai bagian dari pengelolaan usaha yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan dalam melakukan pencatatan keuangan tersebut juga mencerminkan adanya kendala dalam aspek literasi keuangan, yang berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan bisnis secara tepat serta mempengaruhi kemampuan usaha dalam mengukur kinerja keuangan secara akurat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan pendampingan terkait pencatatan keuangan sederhana agar pelaku UMKM dapat mengelola usahanya secara lebih profesional dan terstruktur.

Penelitian ini dilaksanakan pada periode pasca resesi ekonomi dengan tujuan memperoleh objek penelitian yang relevan, yaitu pelaku UMKM yang tetap mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya selama tekanan resesi ekonomi berlangsung. Dengan demikian, penelitian dapat menggambarkan kondisi nyata mengenai faktor-faktor yang berperan dalam kemampuan UMKM bertahan di tengah ketidakstabilan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil judul untuk penelitian ini adalah **“PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA MASA RESESI EKONOM**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada masa resesi ekonomi di Kecamatan Tenggilis Mejoyo?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada masa resesi ekonomi di Kecamatan Tenggilis Mejoyo?
3. Apakah literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada masa resesi ekonomi di Kecamatan Tenggilis Mejoyo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada masa resesi ekonomi di Kecamatan Tenggilis Mejoyo.
2. Untuk menganalisa bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada masa resesi ekonomi di Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

3. Untuk menganalisa bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada masa resesi ekonomi di Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik bagi peneliti sendiri, masyarakat umum, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian ilmiah, khususnya terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam konteks UMKM. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti lain dalam melakukan studi sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman baru mengenai kondisi UMKM, khususnya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dalam kaitannya dengan literasi dan inklusi keuangan.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai pemahaman dan penerapan literasi serta inklusi keuangan oleh pelaku UMKM di wilayah tersebut.

- c. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip inklusi dan literasi keuangan.
- d. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau landasan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang relevan.